



**KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA**

**PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2021**

**TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA  
( RKP-Desa )  
TAHUN 2022**



**DESA PANDANSARI  
KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA**



KEPALA DESA PANDANSARI  
KABUPATEN PURBALINGGA

PERATURAN DESA PANDANSARI  
NOMOR 06 TAHUN 2021

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PANDANSARI

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 49, Ayat (4) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, Pengesahan Dokumen RKP Desa dilakukan dengan penandatanganan Peraturan Desa tentang RKP Desa oleh kepala Desa dan ketua BPD;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa Pandansari tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara tahun Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2015 tentang Evaluasi Perkembangan Desa Dan Kelurahan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2037);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 96 Tahun 2017 tentang Tata Cara Kerja Sama Desa di Bidang Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1444);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa Dan Lembaga Adat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 569);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
18. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
20. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pedoman Umum Pendampingan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1262);
21. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1035);
22. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
23. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
24. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan Dan Peningkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa Badan Usaha Milik Desa/Badan Usaha Milik Desa Bersama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 252);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purbalingga (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga Nomor 30);

26. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 62 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa serta Pelaksanaan Pembangunan Desa di Kabupaten Purbalingga (Berita daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2017 Nomor 62);
27. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 73 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 45 Tahun 2018 Tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2021 Nomor 73 );
28. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 21 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Purbalingga Tahun 2019 Nomor 21 );
29. Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 77 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Bupati Purbalingga Nomor 30 Tahun 2016 Tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 77 Tahun 2015 tentang tata cara Pengadaan Barang dan Jasa di Desa;
30. Peraturan Desa Pandansari Nomor 03 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2019 - 2025 (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 3);
31. Peraturan Desa Pandansari Nomor 05 Tahun 2021 tentang Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-usul dan Lokal Berskala Desa (Lembaran Desa Pandansari Tahun 2021 Nomor 5 )

Dengan Kesepakatan Bersama  
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PANDANSARI  
dan  
KEPALA DESA PANDANSARI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA  
PEMERINTAH DESA TAHUN 2022

BAB I  
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud:

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.



2. Perdesaan adalah kawasan kerja sama antar Desa untuk pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
3. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Desa.
4. Pembangunan Perdesaan adalah pembangunan yang dilaksanakan antar Desa dalam bidang pengembangan usaha, kegiatan kemasyarakatan, pelayanan, pembangunan, pemberdayaan masyarakat, keamanan, dan ketertiban.
5. Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.
6. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
10. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh BPD untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disebut Musrenbang Desa adalah musyawarah antara BPD, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan Pembangunan Desa yang didanai oleh anggaran pendapatan dan belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan/atau anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama BPD.



13. Perencanaan Pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan BPD dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka peningkatan kualitas hidup manusia dan penanggulangan kemiskinan.
14. SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.
15. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kewargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan Pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
16. Sistem Informasi Desa adalah sistem pengolahan data kewilayahan dan data kewargaan di Desa yang disediakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi serta dilakukan secara terpadu dengan mendayagunakan fasilitas perangkat lunak dan perangkat keras, jaringan, dan sumber daya manusia untuk disajikan menjadi informasi yang berguna dalam peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik serta dasar perumusan kebijakan strategis Pembangunan Desa.
17. Peta Jalan SDGs Desa adalah dokumen rencana yang memuat kebijakan strategis dan tahapan pencapaian SDGs Desa sampai dengan tahun 2030.
18. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disebut RPJM Desa adalah dokumen perencanaan kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
19. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa adalah dokumen penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
20. Daftar Usulan RKP Desa adalah penjabaran RPJM Desa yang menjadi bagian dari RKP Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada pemerintah daerah kabupaten/kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah.
21. Aset Desa adalah barang milik Desa yang berasal dari kekayaan asli Desa, dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Desa, atau perolehan hak lain yang sah.



22. Potensi Aset Desa adalah segala potensi Desa yang meliputi sumber daya alam dan lingkungan hidup, sumber daya manusia, sumber daya sosial dan budaya, sumber daya ekonomi, dan sumber daya lainnya yang dapat diakses, dikembangkan, dan/atau diubah oleh Desa menjadi sumber daya pembangunan yang dimiliki atau menjadi Aset Desa, dikelola, diolah, dimanfaatkan, dan dipergunakan bagi kesejahteraan bersama masyarakat Desa.
23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
24. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa.
25. Alokasi Dana Desa adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota setelah dikurangi dana alokasi khusus.
26. Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat Desa.
27. Lembaga Adat Desa adalah lembaga yang menyelenggarakan fungsi adat istiadat dan menjadi bagian dari susunan asli Desa yang tumbuh dan berkembang atas prakarsa masyarakat Desa.
28. Pelaksana Kegiatan adalah pelaksana kegiatan Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, terdiri dari unsur perangkat Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa, dan unsur masyarakat.
29. Pendampingan Desa adalah upaya meningkatkan kapasitas, efektivitas, dan akuntabilitas pemerintahan Desa, Pembangunan Desa, Pemberdayaan Masyarakat Desa, pembentukan dan pengembangan badan usaha milik Desa dan/atau badan usaha milik Desa bersama, peningkatan sinergitas program dan kegiatan Desa, dan kerja sama Desa untuk mendukung pencapaian SDGs Desa.
30. Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah anggota masyarakat Desa yang memiliki prakarsa dan/atau yang dipilih oleh Desa untuk menumbuhkan, mengembangkan, dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, dan gotong royong di kalangan masyarakat Desa.
31. Badan Usaha Milik Desa, yang selanjutnya disebut BUM Desa, adalah badan hukum yang didirikan oleh Desa dan/atau bersama Desa-Desa guna mengelola usaha, memanfaatkan aset, mengembangkan investasi dan produktivitas, menyediakan jasa pelayanan, dan/atau menyediakan jenis usaha lainnya untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.



32. Pihak Ketiga adalah lembaga swadaya masyarakat, perguruan tinggi, organisasi kemasyarakatan, atau perusahaan, yang sumber keuangan dan kegiatannya tidak berasal dari anggaran pendapatan dan belanja negara, anggaran pendapatan dan belanja daerah provinsi, anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota, dan/atau APB Desa.

## BAB II SISTEMATIKA PENYUSUNAN RKP Desa

### Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2022 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

**BAB I : PENDAHULUAN**

- 1.1. Latar Belakang.
- 1.2. Dasar Hukum.
- 1.3. Tujuan dan Manfaat.
- 1.4. Proses Penyusunan RKP Desa.
- 1.5. Sistematika.

**BAB II : GAMBARAN UMUM PEMERINTAHAN DESA**

- 2.1. Visi – Misi Kepala Desa.
- 2.2. Gambaran Umum Sosial Budaya.
- 2.3. Gambaran Umum Kemiskinan.
- 2.4. Gambaran Umum Ekonomi.
- 2.5. Gambaran Umum Infrastruktur.

**BAB III : RUMUSAN PRIORITAS MASALAH**

- 3.1. Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan pada RKP Desa Tahun sebelumnya.
- 3.2. Evaluasi laju pencapaian SDGs Desa.
- 3.3. Identifikasi masalah berdasarkan RPJM Desa.
- 3.4. Identifikasi Masalah Berdasarkan Analisa Keadaan Darurat antara lain: bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi dan atau kerusakan sosial yang berkepanjangan.
- 3.5. Identifikasi Masalah berdasarkan Prioritas Kebijakan Pembangunan Daerah.

**BAB IV : RUMUSAN PRIORITAS PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBANGUNAN DESA:**

- 4.1. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Skala Desa Tahun Anggaran 2022.
- 4.2. Berdasarkan Kewenangan Hak asal usul.
- 4.3. Berdasarkan Kewenangan Lokal Skala Desa.
- 4.4. Prioritas Program dan Kegiatan Pembangunan Daerah Tahun Anggaran 2023.
- 4.5. Kebijakan Keuangan Desa.

**BAB V : PENUTUP**

## LAMPIRAN

1. Berita Acara Musyawarah Pembentukan Tim Penyusun RKP Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
2. Keputusan Kepala Desa tentang Tim Penyusun RKP Desa Tahun 2022.
3. Rencana Kerja dan Tindak Lanjut.
4. Daftar Rencana Program dan Kegiatan yang Masuk ke Desa.
5. Data dan informasi tentang rencana pembiayaan pembangunan Desa.
6. Daftar Prioritas Usulan Rencana Program dan/atau Kegiatan Pembangunan Desa untuk 1 (satu) tahun anggaran berikutnya.
7. Daftar Usulan Masyarakat Desa yang Dipilih Berdasarkan Tujuan SDGs Desa.
8. Daftar Rencana Kerja Sama Antar Desa.
9. Daftar Rencana Kerja Sama dengan Pihak Ketiga.
10. Rancangan RKP Desa Tahun 2022.
11. Evaluasi pelaksanaan RKP Desa tahun 2021.
12. Gambar Desain Kegiatan.
13. Rencana Anggaran dan Biaya (RAB).
14. Daftar Usulan RKP Desa Tahun 2023.
15. Berita acara hasil penyusunan rancangan RKP Desa.
16. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang perencanaan Desa.
17. Berita Acara Musyawarah Desa tentang perencanaan Desa, Notulen dan Daftar Hadir.
18. Dokumen Pandangan Resmi BPD.
19. Keputusan Kepala Desa tentang Panitia Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022.
20. Tata tertib musrenbang Desa RKP Desa.
21. Penyusunan Prioritas Program dan Kegiatan.
22. Berita Acara Musrenbang Desa RKP Desa tahun 2022, Notulen dan Daftar Hadir.
23. Keputusan BPD tentang panitia musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022.
24. Dokumen Rancangan RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
25. Berita Acara Musyawarah Desa tentang pembahasan, penyepakatan dan pengesahan rancangan RKP Desa tahun 2022., Notulen dan Daftar Hadir.
26. Dokumen RKP Desa Tahun 2022 dan DU-RKP Desa Tahun 2023.
27. Dokumentasi Foto Kegiatan.



- (2) Penjabaran sistematika RKP Desa Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

#### Pasal 3

RKP Desa Tahun 2022 merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, Lembaga Kemasyarakatan Desa dan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2022.

#### Pasal 4

Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Daftar Pelaksanaan Anggaran (DPA), serta dipertanggungjawabkan oleh Pelaksana Kegiatan dalam Forum Musyawarah Desa.

#### Pasal 5

RKP Desa dapat diubah dalam hal :

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

#### Pasal 6

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

### BAB III KETENTUAN PENUTUP

#### Pasal 7

- (1) Berdasarkan Peraturan Desa ini selanjutnya disusun Anggaran pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Desa ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Desa.

Pasal 8

Peraturan Desa tentang RKP Desa ini berlaku pada saat di undangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan  
peraturan Desa ini dengan menempatkan dalam lembaran Desa.

Ditetapkan di : Pandansari  
Pada Tanggal : 25 September 2021



Diundangkan di Desa : Pandansari  
Pada Tanggal : 27 September 2021



LEMBARAN DESA PANDANSARI TAHUN 2021 NOMOR 6



BERITA ACARA  
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD  
DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG  
KABUPATEN PURBALINGGA

TENTANG

PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA ( RKPDes)  
TAHUN 2022

Pada hari ini *Sabtu* tanggal *dua puluh lima* bulan *September* tahun *Dua ribu dua puluh satu* ,  
kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. RIDI : Kepala Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**
2. TOHA NUR FAIZ : Ketua BPD Desa Pandansari dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Pandansari selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Menyatakan bahwa,

1. **PIHAK KEDUA** telah membahas dan menyepakati Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 yang telah diajukan **PIHAK PERTAMA**
2. **PIHAK PERTAMA** dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku.
3. **PIHAK PERTAMA** akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua Proses telah selesai.
4. **PIHAK PERTAMA** akan menyampaikan kepada Camat Kejobong untuk mendapat evaluasi selambat-lambatnya 3 (tiga ) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini.

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya





**RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKPD-Des) TAHUN 2022**  
**DESA PANDANSARI KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA PROVINSI JAWA TENGAH**

No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Penerimaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan	
		Jenis Kegiatan						Biaya	Sumber	Swadaya	Kepasana Antar Desa	Kepasana Perek Kelga		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01	BIDANG PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA					823.912.100						
		01.01	Penyelenggaraan Belanja Siliap, Tunjangan dan Operasional Pemdes					703.912.100						
		01.01.01	Penyediaan Siliap dan Tunjangan Kepala Desa											
			- Penghasilan Tetap Kepala Desa	Ds Pandansari	1 Thn	1 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	44.200.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Tunjangan Kepala Desa	Ds Pandansari	1 Thn	1 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	30.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.02	Penyediaan Siliap dan Tunjangan Perangkat Desa					520.212.100						
			- Penghasilan Tetap Perangkat Desa	Ds Pandansari	bin/org	12 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	320.212.100	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Tunjangan Perangkat Desa	Ds Pandansari	bin/org	12 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	200.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.03	Penyediaan Jaminan Sosial Bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa					45.000.000						
			- BPJS Kesehatan	Ds Pandansari	bin/org	12 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	20.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- BPJS Ketenagakerjaan	Ds Pandansari	bin/org	12 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	25.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.04	Penyediaan Operasional Pemerintah Desa					29.900.000						
			Belanja barang dan Jasa											
			- Belanja ATK dan Benda Pos	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Bahan Bakar, Minyak dan Gas	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	200.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Foto Copy, Cetak dan Penggandaan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	1.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Makan Minum Rapat	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Pakaian Dinas dan Atribut	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Honorarium	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	7.000.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Perjalanan Dinas	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.500.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Listrik kantor Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	1.500.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Langganan Internet	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Jasa Perpanjangan Pajak	Ds Pandansari	2 Unit	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	200.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Pemeliharaan Inventaris Kantor	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.500.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Belanja Rumah Tangga Kantor Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	1.000.000	PAD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.05	Penyediaan Honorarium dan Tunjangan BPD					24.600.000						
			- Tunjangan Kedudukan Ketua BPD dan Anggotanya	Ds Pandansari	bin/org	7 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	14.400.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
			- Tunjangan Kinerja Ketua BPD dan Anggotanya	Ds Pandansari	bin/org	7 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.200.000	ADD	✓	-	-	-	K.TU dan Umum
		01.01.06	Penyediaan Operasional BPD											



Bidang/ Jenis Kegiatan		Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan		
No	Bidang							Biaya	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	2	- Belanja barang dan jasa	Ds Pandansari	1 Pkt	7 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	-	-	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.01.07 Penyediaan Insentif dan Operasional RT/RW					10.000.000						
		- Insentif RT/RW	Ds Pandansari	1 Pkt	25 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.01.90 Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Penyediaan Uang Penghargaan Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa P	Ds Pandansari	1 Pkt	9 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	-	ADD	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.01.91 Penyediaan Uang Duka Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Meningga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Penyediaan Uang Duka Bagi Kepala Desa Dan Perangkat Desa Meningga	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.01.99 Lain-lain Sub Bidang Siliap dan Operasional Pemerintahan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		- Insentif Pesuruh Kantor Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	1 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	7.500.000	DUPAD	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.02 Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintah Desa					64.500.000						
		01.02.01 Penyediaan sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan											
		- Printer	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	BHP/DO	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.02.02 Pemeliharaan Gedung /Prasarana kantor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.02.03 Pemb.Rehabilitasi,Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.02.99 Lain-lain Sub Bidang Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	50.000.000	BKK	✓	-	-	K.TU dan Umum	
		01.03 Pengelolaan Adm Kependudukan,Pencatatan Sipil,Statistik dan Kearsipan											
		01.03.01 Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.03.02 Penyusunan,Pendataan,Pemutakhiran Profil Desa	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	2.500.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan	
		01.03.03 Pengelolaan administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan	
		01.03.04 Penyuluhan dan Penyadaran Masyarakat tentang Kependudukan dan Capi	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.03.05 Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan	
		01.03.99 Lain-lain Sub Bidang Adm Kependudukan,Capil,statistik dan Kearsipan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		01.04 Penyelenggaraan Tata Proja Pemerintahan,Perencanaan,Keuangan dan Pelaporan					55.500.000						
		01.04.01 Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
- Musyawarah Desa	Ds Pandansari	50 Org		1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan			
- Sosialisasi Kegiatan	Ds Pandansari	300 Org		1 Jan s/d 31 Des 2022	6.500.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan			
- Musrenbangdes	Ds Pandansari	50 Org		1 Jan s/d 31 Des 2022	1.500.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan			
- Pembahasan APBDes	Ds Pandansari	2 Keg		1 Jan s/d 31 Des 2022	1.500.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan			
01.04.02 Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya													
01.04.03 Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa(RP,IMDes/RK/PDes dll)	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kasus/Perencanaan			



No	Bidang	Bidang/ Jenis Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan				Rencana Pelaksanaan Kegiatan
							Biaya	Sumber	Swakelola	Kepiadaan Antar Desa	Kepiadaan Pihak Ketiga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	01 04 04	Penyusunan Dokumen Keuangan Desa(APBDes/Perubahan,LPJ APBDes)	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pencapaian		
	01 04 05	Pengelolaan/Administrasi/Inventarisasi/Penilaian Aset Desa	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pencapaian		
	01 04 06	Penyusunan Kebijakan Desa(Perdes/Perkades dll )	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	2.500.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pencapaian		
	01 04 07	Penyusunan Laporan Kepala Desa/LPP JLPPD	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	2.500.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pencapaian		
	01 04 08	Pengembangan Sistem Informasi Desa	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	20.000.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pencapaian		
	01 04 09	Kordinasi/Kerjasama Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Pembangu	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01 04 10	Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Piliades,Perangkat Desa,Pemilaha	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01 04 11	Penyelenggaraan Lomba antar wilayah dan Pengiriman Kontingen dalam m	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01 04 99	Lain-lain Sub Tata Praja Pemerintahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	01 05	Sub Bidang Pertanahan												
	01 05 01	Sertifikat Tanah Kas Desa												
	01 05 02	Administrasi Pertanahan(Pendaftaran Tanah dan Pemberian Registrasi Agenda Pertanahan )												
	01 05 03	Fasilitasi Sertifikat Tanah Untuk Masyarakat Miskin												
	01 05 04	Kegiatan Mediasi Konflik Pertanahan												
	01 05 05	Kegiatan Penyuluhan Pertanahan	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	BHP			-	-	Kas/Pencapaian	
	01 05 06	Administrasi PBB	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	BHP			-	-	Kas/Pencapaian	
	01 05 07	Penentuan/Pengasasan Batas/Patok Tanah Kas Desa	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	-	DDS			-	-	Kas/Pencapaian	
	01 05 99	Lain-lain Sub Bidang Pertanahan	Ds Pandansari	1 Pkt		1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	BHP			-	-	Kas/Pencapaian	
	Jumlah Bid.Penyelenggaraan Pemerintahan							823.912.100						
2	02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA					1.099.400.000							
	02 01	Sub Bidang Pendidikan					45.000.000							
	02 01 01	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TPQ/Madrasah Non Formal					-							
	-	Honor Pengajar TPQ	Ds Pandansari	1 Ls		1 Jan s/d 31 Des 2022	20.000.000	DDS	✓	-	-	Kas/Pelayanan		
	-	Operasional TPQ dan Kelompok Keagamaan	Ds Pandansari	1 Ls		1 Jan s/d 31 Des 2022	-	DDS	✓	-	-	Kas/Pelayanan		
	-	Honor Guru PAUD	Ds Pandansari	1 Ls		1 Jan s/d 31 Des 2022	-	DDS	✓	-	-	Kas/Pelayanan		

02 01 02	Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 01 03	Penyuluhan dan Pelatihan Pendidikan bagi masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02 01 04	Pemeliharaan sarana Prasarana Perpustakaan/ Iaman Bacaan/Sanggar Belajar, Miskin Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-







No		Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan	Biaya	Sumber					Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Kelga			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
Pembangunan Desa	02.03.12	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengerasan Jalan Usaha Tani ***)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Peningkatan Jalan Usaha Tani	Ds Pandansari	1 pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	100.000.000	PBP	✓	-	-	Kese Kesejahteraan	
	02.03.13	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jembatan Milik Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.03.14	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa( Gorong, Selokan dll)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.03.15	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan BalaiDesa/Balai Kemasyarakatan**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.03.16	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Pemakaman Milik Desa/Situs Bersejarah/Pelilasan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.03.19	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Embung Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.03.20	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Monumen/Gapura/Batas Desa **)	Ds Pandansari	1 pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	15.000.000	-	✓	-	-	Kese Kesejahteraan	
	02.03.99	Lain-lain Kegiatan Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Tata Ruang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Operasional Kegiatan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Kesejahteraan	
	02.04	Sub.Bidang Kawasan Permukiman	-	-	-	-	46.000.000	-	-	-	-	-	
	02.04.01	Dukungan Pelaksanaan Program Pemb/RTLH Gakin	Ds Pandansari	10 Unit	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	36.000.000	PBP	✓	-	-	Kese Pelayanan	
	02.04.11	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sumber Air Bersih Milik Desa **)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Pembangunan Sarana Air Bersih	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	DDS/DAK	✓	-	-	Kese Pelayanan	
	02.04.12	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih KeRumah Tanong**)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.04.14	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK Umum, dll )	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	10.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayanan	
	02.05	Sub.Bidang Kehutanan dan Lingkungan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.05.01	Pengelolaan Hutan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	02.05.02	Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pembangunan Desa	02.06	Sub.Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	-	-	-	-	37.500.000	-	-	-	-	-	
	02.06.01	Pembuatan Rambu-Rambu Jalan Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	15.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pemerintahan	
	02.06.02	Penyelenggaraan Informasi Publik(Poster,Balibo dll )	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	7.500.000	DDS	✓	-	-	Kese Pemerintahan	
	02.06.03	Pembuatan dan Pengelolaan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.06.99	Lain-lain Sub Bidang Perhubungan,Komunikasi dan Informatika	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	15.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pemerintahan	
	-	Sub.Bidang Pariwisata	-	-	-	-	420.000.000	-	-	-	-	-	
Pembangunan Desa	02.07	Sub.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.07.01	Pemeliharaan dan Pemb.Prasarana Energi Alternatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.07.02	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Energi Alternatif	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.07.99	Lain-lain Sub.Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	02.08	Sub.Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	-	Sub.Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	



Bidang Jenis Kegiatan														
No	Bidang	Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Bayar dan Sumber Pembiayaan			Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
								Bayar	Sumber	Swakada	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3		4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
		02.08.01	Pemb Sarana Prasarana Pariwisata Milik Desa	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	250 000 000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		02.08.02	Pemb/Rehabilitasi/Peningkatan Sarana & Prasarana Pariwisata Milik Desa	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	150 000 000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		02.08.03	Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	20 000 000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		02.08.99	Lain-lain Sub Bidang Pariwisata	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		Jumlah Bid Pelaksanaan Pembangunan												
								1.099.400.000						
		03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN	-	-	-	-	39.800.000	-	-	-	-	-	
		03.01	Sub Bid Ketertarikan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.01	Pengadaan/Pyenyelenggaraan Pos Keamanan Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.02	Pengulan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Keterlibatan Oleh Pemdes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		-	Insentif LHMJAS	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.03	Kordinasi Pembinaan Keamanan, Keterlibatan dan Perlindungan Masyarakat Skala Lokal Desa	Ds Pandansari	1 PKT	25 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	7.500.000	PBH	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		03.01.04	Persiapan Kesiapsiagaan/Tanggap Bencana Skala Lokal Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.05	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan Bencana Skala Lokal Desa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.06	Bantuan Hukum Untuk Aparatur Desa dan Masyarakat Miskin	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.07	Pelatihan/Pyenyuluhan/Sosialisasi Kepada masy Bid Hukum dan Perlindungan Masy	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.01.99	Lain-lain Sub Bid Keterlibatan, Keterlibatan Umum dan Perlindungan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.1.02	Pengulan dan Peningkatan Kapasitas Linmas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		03.02	Sub Bid Kebudayaan dan Keagamaan	-	-	-	-	11 000.000	-	-	-	-	-	
		3.2.01	Pembinaan Grup Kesenian dan Kebudayaan Tingkat Desa	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2 000 000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.2.02	Pengiriman Kontingen Group Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.2.03	Penyelenggaraan Festival Kesenian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		3.2.04	PHBN	Ds Pandansari	1 PKT	8 Keg	1 Jan s/d 31 Des 2022	7 000 000	ADD	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.2.05	PHBN	Ds Pandansari	1 PKT	8 Keg	1 Jan s/d 31 Des 2022	2 000 000	DLL	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.3	Sub Bid Kepemudaan dan Olahraga	-	-	-	-	6.000.000	-	-	-	-	-	
		3.3.01	Pengiriman Kontingen Kepemudaan dan Olahraga	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	-	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.3.02	Penyelenggaraan Lomba Kepemudaan dan Olahraga	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	-	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.3.03	Pemeliharaan sarana Prasarana Kepemudaan dan Olahraga	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.3.04	Pembinaan Karang Taruna/Klub Kepemudaan/Klub Olahraga	Ds Pandansari	1 PKT	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kase Pemantaban	
		3.4	Sub Bid Ketekembangan masyarakat	-	-	-	-	22.800.000	-	-	-	-	-	



No	Bidang/ Jenis Kegiatan		Lokasi	Volume	Sasaran/ Mantaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
	Bidang	Jenis Kegiatan					Biaya	Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
		3.4.01 Operasional LPMD	Ds Pandansari	1 Pkt	11 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	7.500.000	ADD	✓	-	-	Kese Pelayan
		3.4.02 Operasional PKK	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	8.500.000	ADD/PBH	✓	-	-	Kese Pelayan
		3.4.03 Pembinaan Lembaga Masyarakat										
		- Belanja Upah dan Insentif BKAD	Ds Pandansari	1 Pkt	6 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	1.800.000	DLL	✓	-	-	Kese Pelayan
		- Operasional KPMD	Ds Pandansari	1 Pkt	6 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	PBP	✓	-	-	Kese Pelayan
						Jumlah Bid. Pembinaan Kemasyarakatan	39.800.000					
4		4 Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa					136.000.000					
		4.1 Sub. Bid. Kelautan dan Perikanan					5.000.000					
		4.1.01 Bantuan Perikanan ( Bibit/Pakan/dst )	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		4.2 Sub. Bid. Pertanian dan Peternakan					3.000.000					
		04.02.01 Peningkatan Produksi Peternakan/Pelatihan Bibit Sapi	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		04.02.03 Penguatan Ketahanan Pangan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	200.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		04.02.99 Lain-lain Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	265.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		4.3 Sub. Bid. Peningkatan Kapasitas Aparatur Pemdes					14.000.000					
		04.03.01 Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓			Kese Pemandahan
		04.03.02 Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa										
		- Pelatihan Penyusunan RAB	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		04.03.03 Peningkatan Kapasitas BPD	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		04.03.04 Kegiatan Pembentukan dan Fasilitas Kader Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat										
		- Pekan Inovasi Desa	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	3.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		- Pelatihan Pembuatan Dokumentasi dan Pengelolaan WEB	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓	-	-	Kese Pelayan
		4.4 Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perindungan anak dan Keluarga					34.000.000					
		1 Penyuluhan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓			Kese Pelayan
		2 Santunan Yatim Piatu	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	2.000.000	DDS	✓			Kese Pelayan
		3 Fasilitas Desa Binaan Desa Layak anak dan Perempuan	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	30.000.000	DDS	✓			Kese Pelayan
		4.5 Sub Bidang Koperasi, UMKM					5.000.000					
		1 Pengembangan UMKM	Ds Pandansari	1 Pkt	50 Org	1 Jan s/d 31 Des 2022	5.000.000	DDS	✓			Kese Pelayan
		4.6 Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal					75.000.000					
		1 Model BUMDes	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	75.000.000	DDS/PBP	✓			Kese Pelayan
						Jumlah Bidang Pemberdayaan Masyarakat	130.000.000					



Bidang/ Jenis Kegiatan			Lokasi	Volume	Sasaran/ Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Biaya dan Sumber Pembiayaan		Pola Pelaksanaan			Rencana Pelaksanaan Kegiatan
Bidang	Jenis Kegiatan	Biaya					Sumber	Swakelola	Kerjasama Antar Desa	Kerjasama Pihak Ketiga		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
5	5	Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa					475.000.000					
	4.1	Penanggulangan Bencana										
	4.1.01	Penanggulangan Bencana	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	95.000.000	DDS	√			Kase Kesejahteraan
	4.1.02	Penanganan Keadaan Mendesak	Ds Pandansari	1 Pkt	-	1 Jan s/d 31 Des 2022	475.000.000	DDS	√			Kase Kesejahteraan
Jumlah Bld. Penanggulangan Bencana, Darurat dan Mendesak Desa							570.000.000					
Jumlah Total							2.669.112.100					

Ketua

Tim Penyusun RKP/Desa

  
SUKANDAR

